

Pengaruh Belanja Daerah Dan Kemahalan Konstruksi Terhadap Pembangunan Manusia Dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Papua

Paul

pstreasure726@gmail.com

Agustinus Salle

Ida Ayu Purba Riani

Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of regional spending and construction costs on HDI with BPK audit opinion as a moderating variable. This study uses a panel data structure from 29 districts/cities in Papua Province for nine years (2011-2019). The model used is fixed effect through Hausman test. The results of statistical tests show that the regional expenditure variable has a positive and significant effect on the HDI, while the level of construction costs has a negative and significant effect on the HDI. The statistical test results also show that the audit opinion weakens the influence of regional spending on HDI, and strengthens the effect of construction costs on HDI.

Keywords: regional expenditure, human development index (hdi), construction cost index (cci), and audit opinion

1. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci utama dari kemajuan suatu Negara. Sebagaimana diketahui bahwa sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Merealisasikan hal tersebut, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia mengalami peningkatan. Pada 2019, IPM Indonesia mencapai 71,92 meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Secara kuantitatif data BPS tersebut menunjukkan bahwa IPM mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum cukup mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia sudah tinggi. Pasalnya, merujuk dari data *United Nations Development Programme* (UNDP) memberikan skor 0,707 untuk Indonesia. Dengan skor ini Indonesia berada di peringkat 6 di Asia Tenggara dan 111 di dunia dari 189 negara. Itu artinya, di Asia Tenggara IPM Indonesia masuk dalam kategori relatif rendah.

Pada saat ini Indonesia memang masih menghadapi masalah rendahnya tingkat pembangunan manusia, antara lain seperti dalam bidang *educational achievement* yakni kurangnya tingkat pendidikan pada masyarakat, dalam bidang kesehatan yakni angka harapan hidup yang rendah dalam *access to resource* yakni PDB riil per kapita yang cukup rendah. Amanat Presiden Republik Indonesia, bahwa untuk menjadi negara maju Indonesia harus mampu mengatasi lima inti permasalahan yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBD. Dan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera yang tercermin dari kualitas pembangunan manusia.

Sebagai bagian dari masa depan Indonesia, Papua merupakan salah satu provinsi di wilayah paling timur Indonesia yang menjadi salah satu lokus prioritas pembangunan melalui Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Papua telah memberi kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun hingga kini kondisi pembangunan manusia di Papua masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Upaya mengejar ketertinggalan adalah melalui kebijakan otonomi khusus yaitu implementasi sistem desentralisasi kewenangan fiskal

berdasarkan UU Otonomi Khusus. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat asli Papua agar secara afirmatif terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, politik, hingga birokrasi.

Kebijakan Otonomi Khusus dalam UU No.21 Tahun 2001 pasal 34 ayat (3), dana Otsus bertujuan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Jumlah penerimaan dana Otsus Papua sejak tahun 2002 hingga 2019 tidak kurang dari 67 triliun rupiah. Penerimaan ini seharusnya menjadi anggaran belanja daerah yang efektif sebagai modal dalam membangun. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua yang merupakan cita-cita dari kebijakan Otonomi Khusus. Namun dalam perjalanannya Papua acapkali menjadi sorotan nasional. Hal ini karena sejak diberlakukannya otonomi khusus hingga saat ini, Papua masih relatif tertinggal dari provinsi lain di Indonesia.

Hingga tahun 2019, sekitar 60 persen kabupaten/kota masih mempunyai nilai IPM di bawah rata-rata Provinsi. Pada tahun yang sama, hanya tiga kabupaten yang capaian IPM-ya masuk kategori tinggi yaitu Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Mimika. Sementara itu Kota Jayapura satu-satunya yang mencapai kategori sangat tinggi yaitu 80,16. Perlu dicatat juga bahwa 17 kabupaten diantaranya (58 persen) masih dalam kategori rendah (IPM kurang dari 60). Dengan mengamati fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa rendahnya IPM di Papua ini tidak lepas dari masih tingginya disparitas pembangunan antar daerah. Hal ini diduga jadi penyebab kenaikan IPM tidak maksimal sehingga selalu berada di bawah IPM Nasional. Dengan kata lain bahwa realitas pembangunan manusia saat ini masih jauh dari idealnya, oleh karena itu penelitian terkait IPM di Papua sangat penting untuk terus dikaji.

Sebagaimana diketahui bahwa melalui implementasi otonomi khusus, penerimaan dana Otsus Papua sejak tahun 2002 hingga 2019 seharusnya menjadi bekal anggaran belanja daerah yang efektif dalam membangun. Hal ini karena melalui pengelolaan belanja daerah yang tepat akan mendorong peningkatan yang berkelanjutan bagi IPM apalagi jika belanja tersebut dialokasikan pada pembangunan yang bersentuhan dengan komponen IPM (Adi, 2007). Anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan stimulus bagi perekonomian daerah. Alokasi belanja daerah setiap kabupaten/kota berbeda, hal ini karena perbedaan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Selain itu besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah (Rike Yolanda Panjaitan, 2021).

Dalam tiga tahun terakhir belanja daerah kabupaten/kota cenderung meningkat. Besarnya belanja daerah harus mampu dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pada tahun 2019 realisasi belanja daerah Kabupaten Supiori yaitu 0,69 triliun; terendah dari kabupaten/kota lainnya. Empat kabupaten lainnya dengan belanja daerah dibawah 1 triliun yaitu Waropen, Deiyai, Dogiyai, dan Mamberamo Tengah mempunyai. Sedangkan Kabupaten Merauke dan Mimika mempunyai anggaran belanja fantastis yaitu diatas 2 triliun. Sebagaimana diketahui juga bahwa kedua kabupaten tersebut mempunyai sumber PAD yang cukup besar. Dengan demikian kemampuan daerah dalam menciptakan dan mengelola sumber-sumber PAD turut memperbesar anggaran belanja daerah tersebut. Oleh Karena itu tantangan saat ini bagi kabupaten yang porsi terbesar anggaran belanja daerah masih bergantung pada dana transfer pusat. Perlu upaya ekstra untuk menemukan sumber-sumber PAD yang potensial demi meningkatkan belanja daerah. Semakin besar belanja daerah akan berdampak positif bagi kinerja IPM (Priambodo, 2015).

Disamping itu kabupaten yang sebagian besar berada di wilayah pegunungan memiliki kesulitan geografis yang cukup tinggi. Hal ini karena masih mengandalkan transportasi jalur udara. Sementara itu faktor cuaca dan keterbatasan unit maskapai seringkali menghambat proses distribusi barang dan orang sehingga relatif sulit menekan tingginya harga barang. Akibatnya adalah beban anggaran belanja pemerintah daerah yang harus mampu mengakomodir tingginya harga kemahalan konstruksi (IKK). Dalam tahun 2019 ada empat kabupaten di Papua dengan nilai IKK tertinggi yaitu Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Mamberamo Tengah. Dari sisi anggaran, belanja daerah di kabupaten tersebut justru tidak sefantastis Kabupaten Merauke dan Mimika. Apabila dilihat dari IPM, maka empat kabupaten tersebut juga memiliki kinerja IPM yang begitu rendah. Dengan demikian IKK berpengaruh negatif terhadap IPM (Rahmadhani, 2019). Hal ini karena dalam kondisi beban harga konstruksi yang

tinggi, cenderung melemahkan kinerja pembangunan khususnya dibidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pada tahun yang sama, ada sebelas kabupaten/kota dengan nilai IKK relatif rendah yaitu dibawah 160, dan tiga yang terendah diantaranya adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Biak Numfor. Seluruh kabupaten/kota dengan nilai IKK yang rendah ini meskipun memiliki belanja daerah yang juga relatif kecil, namun terbukti mempunyai kinerja IPM lebih baik yaitu kategori tinggi hingga sangat tinggi. Dengan demikian terlihat bahwa daerah dengan nilai IKK yang rendah cenderung memiliki kemudahan dalam membangun serta mampu mengoptimalkan berbagai aspek yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia.

Dari sisi evaluasi terhadap kinerja dan laporan keuangan, dalam tiga tahun terakhir ada trend kenaikan opini WTP di kabupaten/kota. Sebaliknya jumlah opini WDP dan TW terus menurun, bahkan tidak ada lagi kabupaten yang berstatus opini TMP. Selain itu jumlah kabupaten/kota penyandang opini WTP sudah lebih dominan dari pada WDP dan TW. Ada delapan kabupaten/kota yang secara konsisten mempertahankan predikat WTP selama tiga tahun, dan tujuh kabupaten lainnya meraih WTP untuk pertama kalinya. Tren kenaikan jumlah opini WTP serta penurunan opini WDP dan TW, secara umum menggambarkan adanya perbaikan dalam penyajian LK sesuai dengan prinsip yang berlaku. Ini menunjukkan adanya upaya untuk senantiasa membenahi sajian laporan keuangan agar semakin realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tahun 2019 masih tersisa sedikitnya empat kabupaten dengan opini audit TW. Status opini tersebut menunjukkan gejala masih lemahnya sistem pengendalian intern (SPI). Atau bisa pula bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Kelemahan ini berdampak finansial dan penyimpangan administrasi. Sebaliknya kabupaten/kota yang meraih WTP secara konsisten dapat lebih menata anggaran secara tertib, sehingga efektif dalam mengalokasikan mata anggaran sesuai target pembangunan yang ditentukan bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini kemudian berdampak pada output pembangunan yang tercermin melalui indikator-indikator pembangunan di daerah.

Penerapan otonomi daerah, disisi lain mendorong pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara mandiri sesuai aspirasi masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh pada kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi khusus.

Penelitian oleh (Dewi, 2015) menunjukkan adanya hubungan antara kinerja pembangunan daerah dengan opini audit BPK yang bersifat timbal balik atau saling memengaruhi. Kaitannya dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhani, 2019) yang menggunakan variabel bebas IKK, Kemandirian Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa secara parsial IKK berpengaruh negatif terhadap IPM pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal ini cukup menjelaskan bahwa IKK memiliki hubungan negatif dengan pembangunan manusia karena dari segi ekonomi karena biaya konstruksi yang mahal akan menghambat proses pembangunan infrastruktur dan prasarana. Dengan demikian secara tidak langsung, tingginya IKK suatu wilayah berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Muda et al., 2014) menggunakan variabel bebas IKK, pertumbuhan ekonomi, dan alokasi belanja modal dengan daerah penelitian di Sumatera Utara menunjukkan bahwa secara parsial IKK dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap IPM pada kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya diatas, diketahui bahwa kinerja pembangunan manusia (IPM) di Papua masih tertinggal dari provinsi lain. Berbagai kajian dan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan dan pengaruh variabel belanja daerah, IKK, dan IPM. Disamping itu perlu terus dikaji variabel-variabel yang secara empiris diduga berpengaruh terhadap IPM. Unsur yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada periode penelitian yang lebih baru dan pilihan variabel penelitian yang digunakan dalam menguji pengaruhnya

terhadap IPM. Selain itu, penelitian ini menarik karena adanya *research gap* yaitu ketidakkonsistenan hasil pada beberapa penelitian terdahulu terutama mengenai hubungan belanja daerah dan IPM. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian sebelumnya, dan *research gap*, maka peneliti tertarik untuk menguji pengaruh Belanja daerah dan IKK terhadap IPM dengan opini audit sebagai variabel moderasi, studi kasus dilakukan di 29 kabupaten/kota se-provinsi papua selama periode 2011-2019.

2. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data menggunakan model regresi data panel dan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Oleh karena perbedaan satuan antar variabel, maka dilakukan konversi atau transformasi data agar relatif menjadi seragam, memperkecil skala, dan melihat hubungan elastisitas. Selanjutnya model tersebut dinyatakan ke dalam bentuk model *logaritma natural* (Ln) melalui transformasi logaritma seluruh variabel sehingga diperoleh persamaan dibawah ini:

$$L_n(y) = \beta_0 + \beta_1 L_n(X_1) + \beta_2 L_n(X_2) + \beta_3 L_n(M_1) + \beta_4 L_n(M_2) + \epsilon$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Model Regresi Data Panel

Pada hasil uji model regresi data panel, melalui uji Hausman diperoleh *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik yang selanjutnya digunakan untuk estimasi data pada 29 kabupaten/kota selama periode 2011 – 2019 yaitu:

Tabel 1. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.925472	0.126984	15.16309	0.0000
X1	0.094179	0.004535	20.76831	0.0000
X2	-0.108798	0.016377	-6.643432	0.0000
M1	-0.017888	0.002351	-7.608440	0.0000
M2	0.098656	0.012570	7.848436	0.0000
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.993685	<i>Mean dependent var</i>	6.790403	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.992799	<i>S.D. dependent var</i>	3.207423	
<i>S.E. of regression</i>	0.026564	<i>Sum squared resid</i>	0.160883	
<i>F-statistic</i>	1121.201	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.014015	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000			

Sumber: Olah Data E-Views 10

3.2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dari masing-masing variabel independent $\alpha 0,85$ maka H0 diterima dan mengartikan bahwa tidak terjadi adanya masalah multikolenearitas. Begitu pula degan uji heterokedastisitas yang menggunakan metode uji glejser, dimana nilai $\text{Obs} \cdot R\text{-squared} = 0.6825 > \alpha 0,05$ maka H0 diterima dan mengartikan bahwa tidak terjadi adanya masalah heteroskedastisitas pada sebaran data.

3.3. Uji Kelayakan Model (Uji Hipotesis)

3.3.1. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan uji parsial (uji t), maka dapat diketahui secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

1. Belanja daerah dengan *coefficient* 0.09418 dan nilai probability t-statistik $0.0000 < \alpha 0,05$ maka H₁ diterima, maka belanja daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

2. Variabel IKK dengan nilai *coefficient* sebesar -0.108798 dan *probability* t-statistik $0,0000 < 0,05$. Sehingga H_2 diterima, maka variabel IKK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM
3. Variabel interaksi Opini audit dan belanja daerah memiliki nilai *probability* t-statistik $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian maka H_3 diterima dan mengartikan bahwa interaksi Opini audit dan belanja daerah terbukti mampu memoderasi belanja daerah terhadap IPM.
4. Variabel interaksi Opini audit dan kemahalan konstruksi memiliki nilai *probability* t-statistik $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian H_4 diterima dan mengartikan bahwa interaksi opini audit dan kemahalan konstruksi secara parsial terbukti mampu memoderasi kemahalan konstruksi terhadap IPM.

3.3.2. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan uji simultan maka dapat diketahui nilai *Probability* F-statistik $0,0000 < \alpha 0,05$ maka H_0 diterima dan mengartikan bahwa seluruh variabel independen yaitu belanja daerah, IKK, belanja daerah dan IKK yang dimoderasi oleh opini audit terhadap IPM dan variabel opini audit secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu IPM.

3.3.3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, dapat diketahui nilai R-squared sebesar 0,9936 atau 99,36%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu belanja daerah, IKK dan opini audit mampu menjelaskan atau mampu menggambarkan variabel dependen IPM sebesar 99,36%. Sisanya sebesar 0,64% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.3.4. Interpretasi Model Persamaan Regresi

Berdasarkan data hasil transformasi dan pengolahan, maka didapatkan model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$L_n(y) = 1.925 + 0.094 L_n(X_1) - 0.108 L_n(X_2) - 0.017 L_n(M_1) + 0.098 L_n(M_2) + \varepsilon$$

Dimana:

Y	= Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
X1	= Belanja daerah (BD)
X2	= Indeks Kemahalan konstruksi (IKK)
M1	= Interaksi Opini Audit terhadap BD (OA*BD)
M2	= Interaksi Opini Audit terhadap IKK (OA*IKK)
Z	= Opini Audit (OA)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien parameter
ε	= <i>Disturbance error</i>

3.4. Pembahasan

Pengaruh belanja daerah terhadap IPM, dengan nilai taraf signifikansi ($0,0000 < 0,05$) maka H_1 diterima dan dapat dikatakan belanja daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan nilai koefisien regresi 0.09418 memiliki arti bahwa apabila belanja daerah meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kualitas IPM sebesar 0.09418 satuan dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Kondisi tersebut sangat realistis karena dengan adanya kenaikan belanja daerah, maka semua komponen pembentuk IPM antara lain dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi ekonomi akan ikut meningkat signifikan.

Peningkatan kualitas manusia sejatinya adalah investasi, dimana dengan semakin efektifnya pemanfaatan dan penyerapan belanja daerah diberbagai bidang prioritas, maka secara perlahan akan mendorong perubahan komponen IPM yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pengaruh IKK terhadap IPM, dengan taraf signifikansinya ($0,0000 < 0,05$) sehingga H_2 diterima dan dapat dikatakan bahwa faktor kemahalan konstruksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. IKK berpengaruh terhadap IPM dengan koefisien regresi -0.10878 mengartikan bahwa apabila IKK naik sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan kinerja IPM sebesar 0.10879 satuan.

Hal ini karena semakin tinggi nilai indeks kemahalan konstruksi, akan mengurangi kemampuan belanja daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan sehingga pada akhirnya akan mengarah pada menurunnya kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.

Opini audit memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap IPM, dengan nilai signifikansi $0,0000 < 0,05$, dengan demikian H_3 diterima bahwa opini audit mampu memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap IPM. Interaksi opini audit dan belanja daerah berpengaruh terhadap IPM dengan koefisien regresi bernilai negatif yaitu -0.01788 mengartikan bahwa setiap interaksi opini audit dan belanja daerah naik satu satuan, akan mengkoreksi IPM sebesar 0.01788 dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

Hal ini diduga karena secara umum hasil audit atas pengelolaan anggaran belanja daerah di kabupaten/kota masih menunjukkan sejumlah permasalahan terkait regulasi, perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain itu terdapat ketidakpatuhan atas peraturan perundangan yang signifikan maupun kelemahan pengendalian internal (Sukmalana et al., 2020). Padahal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, pemerintah daerah kabupaten diwajibkan menyusun LKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Opini audit memoderasi pengaruh kemahalan konstruksi terhadap IPM dengan nilai probability lebih kecil daripada nilai taraf signifikansinya sehingga H_4 diterima. Artinya opini audit mampu memoderasi pengaruh IKK terhadap IPM. Interaksi tersebut menghasilkan koefisien regresi 0.0986 mengartikan bahwa apabila interaksi opini audit dan IKK naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.0986 dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

Hasil uji interaksi tersebut mampu memperkuat kinerja IPM ialah karena meskipun tingkat kemahalan konstruksi pada kabupaten/kota di Papua cukup tinggi jika dibandingkan Kota Surabaya sebagai acuan, namun kondisi ini dianggap masih relatif mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi yang dimaksud yaitu seperti data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi (BPS, 2015).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan antara lain:

1. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan demikian variabel belanja daerah mampu mendorong peningkatan kinerja IPM. Semakin tinggi belanja suatu daerah dan dapat terealisasi, maka akan meningkatkan pembangunan kualitas manusia di daerah tersebut. Selain itu IKK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hubungan yang kuat antara IKK terhadap IPM berbanding terbalik, artinya jika kemahalan konstruksi meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan pembangunan manusia, dan begitu sebaliknya.
2. Opini audit mampu memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap IPM, hubungan moderasi tersebut menekan atau berpengaruh negatif terhadap kinerja IPM. Disisi lain opini audit memoderasi (memperkuat) pengaruh IKK terhadap IPM. Hubungan moderasi tersebut menjadi katalisator yang mendorong kinerja pembangunan manusia.
3. Koefisien determinasi dengan nilai *R-squared* $99,36\%$ atau mendekati 1 berarti variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variasi variabel dependen.
4. Hasil penelitian ini juga merespon adanya *research gap*. yaitu ketidakkonsistenan hasil pada beberapa penelitian terdahulu terutama mengenai hubungan belanja daerah dan IPM. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja IPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS* (S. R. Ajija (ed.); 1st ed.). Jakarta Salemba Empat, 2011.
- Andriyani, S. (2012). *Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. 1–19.

- Angraini, T. (2020). Pengaruh Kompetensi Auditor Independensi Auditor Audit Tenure dan Kualitas Laporan Keuangan Klien Terhadap Kualitas Audit. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Arikunto; Suhaimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (A. dan Suhaimi (ed.); Ed.Rev.201). Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Badan Pusat Statistik, 2021. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Tahun 2011-2019*. <http://www.papua.bps.go.id/>. Diakses pada 26 April 2021 pkl 13:46 WIT.
- Badrudin, K. (2011). *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. 3–10.
- Bappeda Provinsi Papua. (2020). *Infografis Hasil Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2020*.
- Basuki, Agus Tri; Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)* (A. T. Basuki (ed.); 1st ed., Issue Resression Analysis). PT Raja Grafindo Persada. http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show_detail&id=109922
- Beriwisnu, T. C. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Industri dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan*. 6.
- Dewi, H. S. (2015). *Suatu Evaluasi terhadap Kursus Keuangan Daerah*.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. “Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi, Papua. Tahun 2010-2019.” <http://www.djpk.depkeu.go.id/>
- (D. N. G. D. C. Porter (ed.)). Salemba Empat , 2012.
- Hakim, A. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2015*. 3(1984), 1–13.
- Kamilia, Firly Dwitya; Widiastuti, T. (2016). *Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Periode 2011 Hingga 2013 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntan Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); 1st ed.). Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Muda, I., Helmi, S., & Kholis, A. (2014). Kajian Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 12–29. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i1.3588>
- Mulyadi. (2011). *Auditing* (Mulyadi (ed.); cet. 8). Jakarta: salemba empat , 2011.
- Pratowo, N. I. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 15–31.
- Priambodo, A. (2015). *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013)*.
- Rahmadhani, H. J. I. (2019). Pengaruh Kemahalan Konstruksi, Kemandirian Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 301–308.
- Sari Adelia et al. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Sna, September*, 1–26.
- Sarkoro, H. (2016). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sukmalana, Ramadhan, F., Pidhegso, A. Y., Huda, F. N., & Fadli, S. D. (2020). *Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat*. 25.
- Sunarni. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Se-Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Taufikurrahman. (2014). *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Opini Audit Oleh BPK RI Atas LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara*.
- Wahida, N. (2018). *Administrasi Dan Manajemen Keuangan Sektor Publik. Problematika Penerimaan*

Dan Pengeluaran Pemerintah, edisi 1(C), 1–35.

Wibisono, Y. (2005). *Metode Statistik* (Y. Wibisono (ed.); 1st ed.). Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005.

Widaryono, A. (2013). *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis* (A. Widaryono (ed.); 1st ed.). YOGYAKARTA EKONISIA , 2007.